

TokohINDONESIA[®]



COM

■ Edisi 44 | Februari 2017

Tokoh.Id ■

Arsitek Pemulihan Ekonomi
2004-2009 - Duet Sais dan Joki

Penerima 9 Gelar
Doktor Honoris Causa

Wakil Presiden
2014-2019



JUSUF KALLA
TOKOH PERDAMAIAN



TokohINDONESIA.COM | THE JOURNALISTIC BIOGRAPHY | E-MAIL: redaksi@tokohindonesia.com

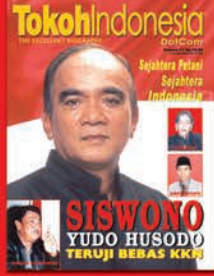
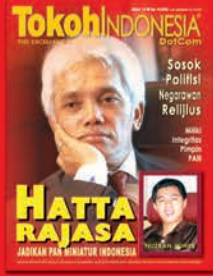


TokohINDONESIA

Majalah Visi dan Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia



www.tokohindonesia.com
THE EXPERIENCE SITE



The Excellent Biography

TokohINDONESIA

The Journalistic Biography

Pemimpin Umum

Ch. Robin Simanullang

Pemimpin Redaksi

Ch. Robin Simanullang

Redaktur Eksekutif

Mangatur L Paniroy

Sekretaris Redaksi

Bantu Hotsan

Redaktur

Dian Gina Rahayu, Marjuka

Situmorang, Sahbuddin

Hamzah, Imam Sumarsono,

Ade Wiharyana

Staf Redaksi

Dharma Leksana, Rukmana

Rafli, Sastra Suganda, Boy

Yapto

Kontributor

Anis Fuadi, Ramlo Hutabarat,

Samsuri, Al Amin

Artistik

Esero Design

Fotografer

Fiesta Image

Pemimpin Usaha

Adur Nursinta Purba

Iklan dan Promosi

Dian Gina Rahayu

Sertifikat Merek

Ditjen HAKI Dephukham Agno:

D00-02-2395

ISSN: 1908-9788

Penerbit

PTASASIRA

Rekening

BRI Cabang Jatinegara, Jakarta

No.Rek 012201000902307

Alamat

Jalan Buni No.36, Pondok

Kelapa, Jakarta Timur 13450

Tel: +6221 - 86907690

Fax: +6221 - 86901951

E-mail:

redaksi@tokohindonesia.com

Website

www.tokohindonesia.com

tokoh.id | tokoh.in | tokoh.co

Harga:

Rp.25.000,-

TOKOH.ID

Tokoh Perdamaian Indonesia



Siapa tokoh yang paling berhasil menyelesaikan beberapa konflik di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini? Dia adalah Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (JK), Menko Kesra (2001-2004) dan Wakil Presiden (2004-2009 dan 2014-2019).

Dia tokoh yang paling berperan dalam penyelesaian konflik horisontal Poso (2001) dan Ambon (2002) serta penyelesaian konflik bersenjata (vertikal) Gerakan Aceh Merdeka (2005). 04

AWARD

Penghargaan Tokoh Perdamaian

Berbagai lembaga memberikan penghargaan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai Tokoh Perdamaian Dunia, karena karya agungnya (master peace) menyelesaikan konflik Poso, Ambon dan Aceh. 18

Sembilan Gelar Doctor HC

Wakil Presiden Jusuf Kalla, tokoh Indonesia yang telah dianugerahi sembilan gelar Doctor Honoris Causa 22

NEWS REVIEW

Arsitek Pemulihan Ekonomi 2004-2009

Pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wapres Jusuf Kalla (2004-2009) sungguh merupakan perpaduan yang unik. Laksana duet sais dan joki. 26

PERSPEKTIF

Wakil Presiden 2014-2019 32

BIODATA

Jusuf Kalla 34

Penulis: Ch. Robin Simanullang
Peliput/Riset: Mangatur L. Paniroy, Bantu Hotsan, Rukmana Rafli, Sastra Suganda
Disain Sampul: Tian Son Lang



JUSUF KALLA

Tokoh Perdamaian Indonesia

Siapa tokoh yang paling berhasil menyelesaikan beberapa konflik di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini? Dia adalah Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (JK), Menko Kesra (2001-2004) dan Wakil Presiden (2004-2009 dan 2014-2019). Dia tokoh yang paling berperan dalam penyelesaian konflik horisontal Poso (2001) dan Ambon (2002) serta penyelesaian konflik bersenjata (vertikal) Gerakan Aceh Merdeka (2005). Maka sepantasnyalah tokoh kelahiran Watampone, 15 Mei 1942 itu dianugerahi Penghargaan Tokoh Perdamaian Indonesia.

Jusuf Kalla sosok orang kaya (pengusaha) yang berpenampilan amat bersahaja, cerdas, lincah dan cepat bertindak, solutif dan amanah. Keberadaannya selalu terasa bermanfaat dalam posisi dan kedudukan apapun. Apakah saat dia masih aktif sebagai aktivis muda, pengusaha, politisi, apalagi (terutama) saat berkesempatan menjadi pejabat negara. Dia amat peka dan terpanggil menyelesaikan masalah, terutama menyangkut pertikaian dan konflik di sekitarnya.

Seorang sahabat dekatnya sejak remaja, HM Alwi Hamu, menuturkan bahwa Jusuf Kalla itu sudah ditakdirkan (dilahirkan) ke dunia untuk menjadi juru damai. Sejak muda, JK sudah berperan sebagai juru damai, baik dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam kegiatan organisasi pemuda. Seperti, bagaimana JK tampil dengan suara (juru) damai ketika terjadi konflik antara HMI dengan GMKI. Jadi, juru damai itu adalah bagian dari hidupnya.

Ketika menjabat Menko Kesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2001-2004), JK berhasil

menyelesaikan konflik Poso dan Ambon dalam pertemuan Malino I dan II. Padahal itu adalah lebih tepat sebagai tupoksinya Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) daripada Menko Kesra. Namun, dia tidak mau *wait and see* hanya karena dia bukan Menko Polkam. Baginya, perdamaian adalah bagian dari kesejahteraan rakyat, tidak sekadar masalah politik, ketertiban dan keamanan.



Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf



Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan mantan petinggi GAM, Hasan Tiro, di kediaman Wapres, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2008

Apalagi, ketika JK menjabat Wakil Presiden (2004-2009), pastilah naluri juru damainya lebih memancar. Maka dia pun dengan lincah, cepat dan cerdas menyelesaikan konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Kala itu, duet Presiden SBY dan Wapres JK, bergerak saling menopang bagai sais dan joki. Presiden SBY bertindak sebagai sais mengendalikan kuda dari atas kereta kencana, sementara Wakil Presiden JK bertindak sebagai joki mengendalikan kuda yang sama dengan menunggangnya langsung di punggung kuda. Demikianlah mereka bekerja, termasuk dalam menyelesaikan konflik bersenjata GAM. Sehingga, tak heran bila Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Satu relatif

lebih berhasil daripada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua.

Berikut ini, secara ringkas diuraikan bagaimana peran JK dalam proses penyelesaian konflik horisontal (umat Islam-Kristen) di Poso dan Ambon (Perdamaian Malino I dan II) dan penyelesaian konflik bersenjata RI – Gerakan Aceh Merdeka (Perjanjian Damai Helsinki, 15 Agustus 2005).

Perdamaian Malino (Poso dan Ambon)

Setelah Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden menggantikan Gus Dur, Jusuf Kalla dipercaya kembali duduk di jajaran kabinet sebagai Menko Kesra periode 2001-2004.

Kiprahnya dalam menjalankan tugas sebagai Menko Kesra terbilang menonjol. Salah satu kerjanya

yang fenomenal (*master peace*) adalah tercapainya perdamaian di daerah konflik Poso dan Ambon. Lewat pertemuan Malino I (22 Desember 2001), dia berhasil meredakan konflik kelompok Islam dan Kristen di Poso. Kemudian, dia pun memprakarsai pertemuan Malino II (11 Februari 2002), dia bisa mengajak kelompok Islam dan Kristen yang bertikai di Ambon untuk berdamai.

Dengan merendah, ia mengatakan upayanya dalam perjanjian Malino adalah bahagian dari tugas sebagai seorang menteri, pembantu presiden, mengatasi masalah konflik dan kesejahteraan rakyat. Ia melihat konflik dan perselisihan akan menyebabkan kemiskinan, baik dalam bentuk materi ataupun nonmateri. Sehingga, kepada mereka yang bertikai, harus diberikan kesadaran untuk menghentikan konflik dengan

cara damai bukan melalui perang.

“Karena mereka yang berselisih ini memandang dari sudut agama, jadi kita memberikan kesadaran dari sisi agama juga. Karena semua agama, menurut saya, melarang membunuh tanpa alasan yang jelas,” ujar Jusuf Kalla kepada TokohIndonesia.com.

Kendati ia yakin bahwa konflik di Maluku bukanlah konflik agama, tapi awalnya dipicu oleh persoalan ekonomi. Bahwa akhirnya tampak sentimen agamanya yang dominan, menurutnya, itu karena orang tidak menelisiknya dari awal.

Di tengah konflik yang tajam waktu itu, ia berupaya memahami cara berpikir yang sederhana orang Islam dan Kristen di daerah itu. Mereka berpikir bahwa dengan semakin banyak membunuh semakin cepat masuk surga. Lalu ia berupaya secara ikhlas memberikan pengertian bahwa apa yang mereka



Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Ambon

lakukan baik itu kepada orang Islam maupun Kristen sebenarnya semakin membawa mereka masuk neraka. "Saya katakan demikian dengan nada yang keras bagi kedua kelompok," kata JK.

Ia merasa yakin kalau berani terjun langsung, berbicara dengan masyarakat bawah, persoalan apa saja dapat ditemukan jawabannya. Dengan keyakinan itu, ia bisa membujuk dua kelompok yang bermusuhan di Poso dan Ambon untuk duduk dalam satu meja di Kota Malino, Sulawesi Selatan, Desember

2001 dan Februari 2002. Walaupun, ikrar perdamaian itu sempat ternoda oleh sekelompok orang yang belum mempunyai kesadaran damai. Pada awal April 2002, terjadi kerusuhan yang membuat kompleks Kantor Gubernur Maluku luluh-lantak. Tak lama kemudian, meledak kerusuhan berdarah di Soya. Ambon pun sempat kembali tegang. Namun kesadaran masyarakat yang menginginkan damai sudah tumbuh. Sehingga kerusuhan itu tidak membuat mereka terpancing untuk bertikai lagi.

Namun, kala itu ada saja suara yang mengkritisi kecepatan langkah Menko Kesra tersebut dengan menyebutnya mengambil peran Menko Polkam yang ketika itu dijabat SBY yang dikenal terlalu banyak pertimbangan sehingga terkesan lamban. JK membantah terjadi perebutan bola solusi atau tumpang tindih dalam penanganan masalah Ambon dan Poso. Menurutnya, mereka menjalankan tugas saling melengkapi sesuai fungsi masing-masing. "Saya dan Menko Polkam, saling mendukung dan selalu bersama-sama untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan negara melalui presiden, baik itu di Poso, Ambon atau di Aceh. Untuk bagian Poso dan Ambon saya yang mengkordinasikan, sedangkan untuk bagian Aceh Menko Polkam yang mengkordinasikan. Jadi kami saling bekerjasama,"





Konflik Poso dan Ambon berbeda dengan konflik Aceh. Konflik Poso dan Ambon adalah konflik horosontal antar kelompok masyarakat, sedangkan konflik Aceh adalah konflik vertikal antara Pemerintah RI dengan GAM.

katanya.

Saat itu, dalam Kabinet Gotong-Royong Presiden Megawati, juga diupayakan penyelesaian konflik bersenjata GAM di Aceh. Pada tahun 2000 hingga 2002, pemerintah Indonesia dan GAM duduk berunding dengan difasilitasi Henry Dunant Center. Perundingan itu sempat menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan dan jeda kemanusiaan, demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Aceh yang dikenal dengan COHA (*Cessation of Hostilities Agreement*). Namun, akibat saling curiga, terjadi kontak

senjata antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan GAM. Para perunding GAM juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Genjatan senjata tak memiliki jaminan karena kedua pihak masih menguasai senjata di wilayah teritorialnya masing-masing. Justru masa COHA dimanfaatkan oleh GAM dan TNI untuk memobilisasi kekuatan.

Konflik Poso dan Ambon memang mempunyai perbedaan dengan konflik Aceh. Konflik Poso dan Ambon adalah konflik horosontal antar kelompok masyarakat, sedangkan konflik Aceh adalah konflik



Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf mendapat penghargaan dari masyarakat Ambon.

vertikal antara Pemerintah RI dengan GAM.

Saat itu, konflik RI-GAM yang penyelesaiannya dikoordinasi Menko Polkam, gagal diselesaikan. Sementara konflik Poso dan Ambon yang dikoordinasi Menko Kesra berhasil didamaikan.

JK mengaku tidak merasa mengalami tantangan yang berarti dalam menangani konflik itu. Kiatnya adalah keikhlasan hati dan keberanian untuk memasuki pokok persoalan. Keikhlasan hati itu ditunjukkan dan dikomunikasikan. Kemudian, persoalan harus dipahami. Lalu, ada keberanian untuk menyikapi dan menentukan mana yang salah dan yang benar.

Memang, dalam menangani konflik Poso dan Ambon, ia berani mempersalahkan kedua belah pihak. Ia tidak hanya memuji dan membujuk mereka yang bertikai.

Bahkan, “saya marah kepada kedua belah pihak itu,” katanya lugas.

Mengenai keyakinannya bahwa konflik Ambon bukan dipicu oleh urusan agama melainkan urusan ekonomi, ia mengatakan, sebanyak 75 persen konflik di dunia ini gara-gara masalah ketidakadilan dan kemiskinan. Itulah sebabnya sebagian besar konflik terjadi di negara-negara yang tingkat pendapatan per kapitanya rendah, seperti Malaysia, Filipina, India, atau Sri Lanka.

“Di Ambon juga begitu. Semua tak lepas dari pemiskinan yang terjadi di sana. Pada awal 1990-an, harga cengkeh di sana bisa Rp 10 ribu per kilogram. Tapi, setelah ada monopoli Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), harganya malah anjlok hingga tinggal Rp 2.000 per kilogram. Orang Ambon pun marah, lalu membabati tanaman cengkehnya. Akhirnya, mereka jatuh miskin



Unisma memberi gelar Bapak Perdamaian Indonesia kepada Wapres Jusuf Kalla.

dan banyak menganggur. Sebanyak 75 persen tanaman cengkeh berada di kampung-kampung Kristen,” jelasnya.

Sementara, katanya, para pendatang muslim dari Sulawesi Selatan dan Tenggara justru nasibnya makin bagus. “Mereka menguasai pasar, transportasi, angkutan kota, perdagangan antarpulau, dan sebagainya. Bahkan warga muslim juga menguasai struktur pemerintahan. Sebelumnya Gubernur Maluku selalu beragama Kristen, tapi belakangan menjadi yang beragama Islam.

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya, masalah sepele saja bisa menjadi pemicu konflik. “Kasus Ambon kan dimulai dari konflik sopir dengan pemalak atau orang menagih setoran. Tapi, dalam satu-dua hari telah berubah menjadi konflik agama yang susah berakhir.

Malah belakangan datang Laskar Jihad dari kelompok Islam. Lalu muncul pula Front Kedaulatan Maluku dari kelompok Kristen. Keadaan tegang ini terus berlangsung hingga kita berhasil menghentikan konflik dan menekan kesepakatan Malino II.”

Perdamaian di Poso (konflik sejak Desember 1998) ditandai dengan saling memaafkan dari masing-masing kelompok bertikai. Wakil kelompok Islam Haji Sofyan Farid Lembah bertemu dipanggung dengan wakil kelompok Kristen Pendeta R. Damanik. Keduanya saling mengangkat tangan ke atas, kemudian saling berpelukan.

Kemudian dalam suasana haru, Deklarasi Malino I berisi 10 poin pernyataan ditandatangani. Intinya, pihak-pihak yang bertikai menyatakan akan menghentikan semua



Wapres Jusuf Kalla di Bandara Pattimura, Laha, Ambon disambut Muspida Maluku, Rabu (25/11/2015)

konflik dan perselisihan. Mereka berjanji menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum, juga mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.

Saat itu Menko Kesra Jusuf Kalla selaku ketua tim mediator, saat membacakan Deklarasi Malino, menegaskan: “Aparat negara juga harus bertindak tegas dan adil dalam menjaga keamanan.” Penandatanganan deklarasi perdamaian itu juga disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele, Gubernur Sulawesi Selatan Zainal Basri Palaguna, Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Ahmad Yahya, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Zainal Abidin Ishak, Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisma dari Mabes TNI, Sekretaris Umum MUI Din Syamsuddin dan Pendeta Natan Setiabudi dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI).

Demikian pula Deklarasi Malino II (11 Februari 2002) berhasil mengakhiri konflik kelompok bertikai di

Ambon, Maluku. Atas upaya damai yang dikoordinasi Jusuf Kalla, sebanyak 70 delegasi kelompok Islam dan Kristen yang selama lebih tiga tahun bertikai, sepakat menghentikan konflik sejak Senin (11/2/2002) ini. Substansi perundingan (deklarasi) itu adalah penghentian konflik dan tindak kekerasan yang akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.

Penandatanganan Deklarasi Malino II dilakukan Ketua Delegasi Kelompok Islam Thamrin Ely dan Ketua Delegasi Kelompok Kristen Tonny Pariela. Disaksikan Menko Kesra Jusuf Kalla yang didampingi Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Juga hadir Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palaguna, Gubernur Maluku Saleh Latuconsina, Panglima Kodam IX/Pattimura Brigjen TNI Mustopo, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Sunarko Danu Ardianto, Ketua DPRD Maluku Z. Sahuburua, Walikota Ambon MJ Papilaya, dan Wakil Gubernur Maluku Bidang Kesra Paula Renya-



Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diapit Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.

an.

Tokoh Utama Perdamaian Aceh

Jusuf Kalla adalah tokoh utama dalam proses perdamaian Aceh (Perdamaian RI-GAM di Helsinki). Tidak semata-mata karena posisinya sebagai Wakil Presiden RI ketika itu, melainkan juga karena kepekaan dan kapasitasnya sebagai seorang yang terpanggil sebagai sang juru damai. Keterpanggilan itu selalu melebihi beban tugas dan tanggung jawab formalnya dalam posisi jabatan apapun dia.

Maka tatkala dia berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang amat berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga terkesan lamban dan kurang berani mengambil risiko, membuat kepemimpinan (kepekaan dan keterpanggilan) Jusuf Kalla terlihat lebih menonjol. Sehingga dia terkesan melebihi presiden. Padahal, duet SBY-JK tersebut adalah saling mengisi atas kesepahaman

serta kelebihan dan kelemahan di antara mereka.

Ibarat kepemimpinan dalam sebuah kapal yang berlayar di samudera luas. Pimpinan tertingginya adalah Kapten yang menjadi nakhoda. Kapten didampingi Mualim Satu yang menjadi *chief officer*. Dalam keadaan tertentu Mualim Satu dapat menggantikan Sang Kapten menakhodai kapal. Apalagi bila Sang Kapten lebih senang menerawang dan meneropong, tentu Sang Mualim Satu harus cekatan bertindak mengemudikan kapal. Kira-kira demikianlah analogi duet SBY-JK ketika itu.

JK yang memang sejak remaja sudah terpanggil mengerjakan sesuatu jauh melampaui beban tugasnya, tentu akan mengoptimalkan peran amanahnya. Itulah yang dia lakoni ketika menginisiasi, mempersiapkan dan mengordinir timnya untuk mencapai perdamaian di Aceh.

JK mengawalinya dengan pende-

katan informal kepada pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia mengajak Hamid Awaludin dan Farid Husain untuk mendampingi-nya. Ketika JK masih menjabat Menko Kesra, dia sudah berusaha membangun komunikasi dengan panglima GAM dari hutan Aceh sampai luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Belanda dan Swedia.

Berbagai langkah pendekatan dilakukan. Di antaranya, Hamid Awaludin dan Farid Husain berusaha menemui pentolan GAM di Amsterdam, Denmark dan Malaysia. Di Amsterdam tak satu pun pimpinan GAM yang muncul dalam pertemuan. Esoknya, mereka berhasil menemui Yusron, orang GAM di Denmark. Kemudian menemui orang GAM Malaysia di Batam. Namun, GAM Malaysia itu ternyata tak punya pengaruh kuat secara politik.

Ketika JK sudah menjabat Wakil Presiden, Oktober 2004, dia berhasil menghubungi panglima GAM di Aceh, Muzzakir Manaf, atas bantuan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. JK

langsung bicara dengan Muzzakir melalui telepon. Dari Muzzakir, dia tahu bahwa penentu di GAM itu berada di Swedia.

Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda tsunami, menelan korban puluhan ribu jiwa, termasuk sejumlah aktivis GAM. Segala daya dikerahkan untuk menanggulangnya. Tragedi tsunami itu makin mendorong JK untuk mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh. Atas persetujuan Presiden SBY, JK membentuk tim perunding perdamiaan dengan kelompok GAM terdiri dari Hamid Awaludin, Sofyan Djalil, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Agung Wiseka Puja.

JK merancang semua perundingan. Mulai dari persiapan awal, formasi tim, taktik dan strategi pengaturan proses perundingan sampai menjadi eksekutor putusan pada situasi genting dan akhir perundingan.

JK juga mengundang para duta besar negara sahabat, antara lain dari negara Libya, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Swedia, Finlandia,



Wapres Jusuf Kalla, Zaini Abdullah dan Tengku Malik Mahmud Al-Haythar bersama tokoh lainnya.



Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar (duduk) berfoto bersama usai seminar internasional 10 tahun MoU Helsinki di Banda Aceh, 14/11/15.

Singapura dan Jepang, untuk memberikan dukungan internasional terhadap perundingan damai antara pemerintah Indonesia dengan GAM.

JK juga menyusun skenario perundingan. JK membuat skenario (sket-sa) kompromi antara pemerintah dan GAM pada 23 Januari 2005. Skenario itu dijadikan 'kitab kuning' oleh Tim Perunding di meja perundingan. Skenarionya antara lain demikian: Penyelesaian bermartabat dengan target maksimal: Target RI: GAM menyerah tanpa syarat; Target GAM: Merdeka; Kompromi: Aceh tetap dalam NKRI dengan otonomi khusus dan GAM menghentikan perlawanan dan turun menyerahkan senjata dengan syarat-syarat tertentu.

Berbekal skenario itu tim perunding terbang ke Helsinki, Finlandia secara diam-diam dan tertutup. Selama enam bulan, isi dan jalannya

perundingan Cuma diketahui oleh lima orang tim perunding ditambah JK dan SBY.

Perundingan putaran pertama, 28 Januari 2005, skenario penawaran otonomi khusus mendapat perlawanan sengit dari GAM, yang menghendaki referendum dan kemerdekaan. Namun dalam perundingan berikutnya, suasana mulai mencair.

JK membuat skenario tenggat waktu perundingan akan berlangsung lima kali putaran selama kurang lebih enam bulan. Setiap kali terjadi perundingan, JK selalu mengikuti lewat pancaran telepon Hamid Awaludin. Biasanya perundingan diadakan pada dini hari WIB, sehingga JK harus mengikutinya sambil bergolek di tempat tidur.

Ketika perundingan masuk ke putaran keempat, Mei 2005, membahas tentang partai lokal, berlangsung sangat alot. Karena GAM

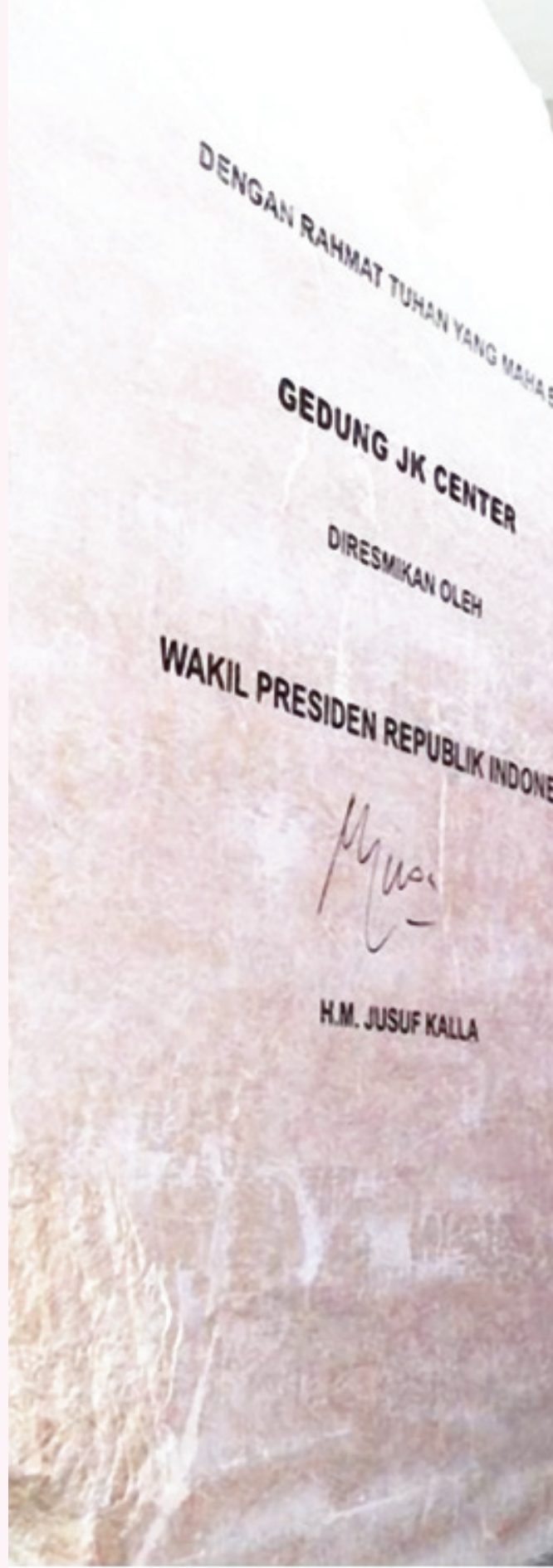
menolak bergabung dengan partai nasional yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Indonesia tak menerima konsep partai lokal yang diinginkan GAM karena dianggap berlawanan dengan konstitusi NKRI dan dicurigai sebagai taktik GAM menuntut kemerdekaan Aceh.

Dalam perundingan alot ini, mediator Ahtisaari, mantan PM Finlandia, menyatakan sikap dan pernyataan tegas kepada GAM: “Jika Anda tetap tidak mau melupakan ide dan pembicaraan tentang kemerdekaan, lebih baik Anda meninggalkan tempat dan pertemuan ini. Pokoknya tak ada pembicaraan tentang kemerdekaan. Saya hanya mau berbicara dengan Anda semua dalam kerangka otonomi khusus.”

“Anda hanya membuang-buang waktu saya. Ingat, sebelum Anda meninggalkan ruangan ini, saya ingin mengatakan bahwa mimpi Anda untuk merdeka tidak akan pernah kesampaian. Paling tidak, selama saya masih hidup atau Anda masih hidup. Saya akan menggunakan semua pengaruh saya agar Anda tidak mendapatkan dukungan apa pun di dunia internasional,” katanya, sambil membanting pensil di atas meja.

Akhirnya, mereka mulai bicara dari hati ke hati. Sampai akhirnya, tim perunding Indonesia meyakini tidak ada lagi agenda merdeka GAM kendati diberi hak partai lokal. Akhirnya pembentukan partai lokal di Aceh diterima. Pada 17 Juli 2005, rancangan Perjanjian Helsinki pun ditandatangani bersama. Kemudian, pada 15 Agustus 2005, rancangan itu disahkan sebagai Perjanjian Damai Helsinki.

■ ch. robin simanullang
mti - TokohIndonesia.com





Penghargaan Tokoh Perdamaian

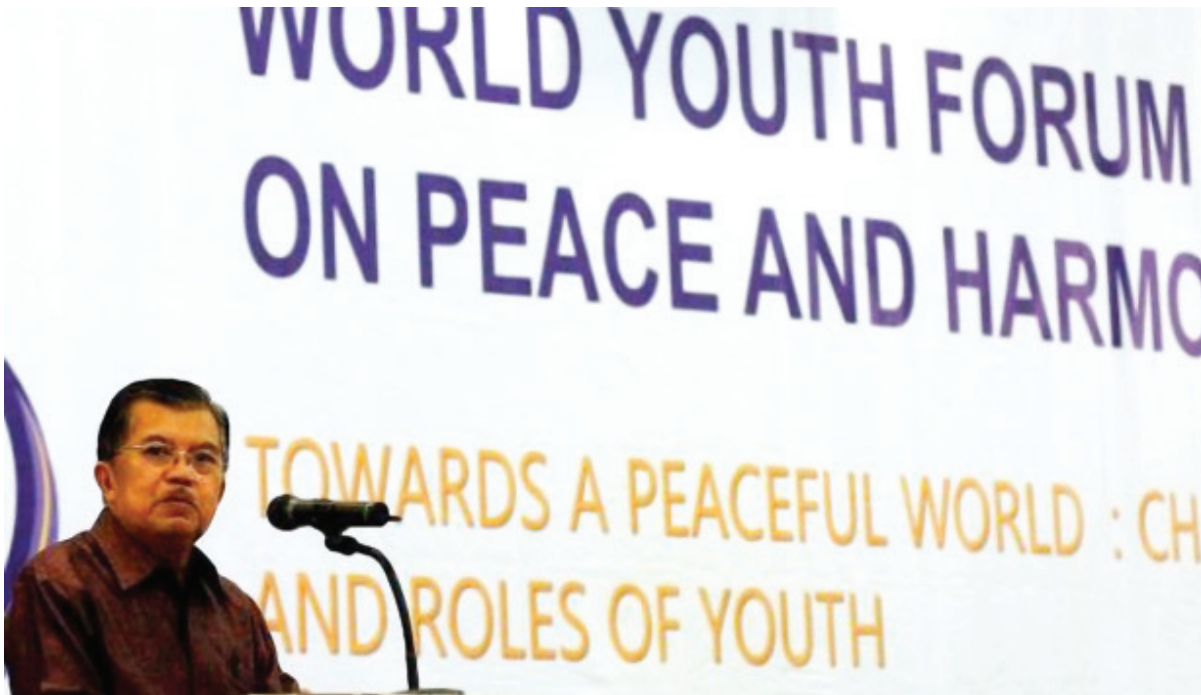
Berbagai lembaga memberikan penghargaan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai Tokoh Perdamaian Dunia, karena karya agungnya (*master peace*) menyelesaikan konflik Poso, Ambon dan Aceh.

Satu di antaranya penghargaan sebagai tokoh perdamaian dunia dari Raja Kamboja, Norodom Sihamoni. Penghargaan tersebut diberi nama Royal Order Sahametrei Officer, semacam Bintang Mahaputra Utama. Jusuf Kalla dianggap memiliki jasa yang sangat besar untuk perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Raja Kamboja dan disaksi-

kan langsung Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Penyerahannya berlangsung di di Phnom Penh, Senin 19 September 2011.

Penghargaan sebagai Tokoh Perdamaian Dunia juga dianugerahkan kepada Jusuf Kalla oleh World Assembly of Youth (WAY) dalam acara *The World Youth Forum on Peace and Harmony* (Pertemuan Pemuda Dunia untuk Perdamaian) di Kota Ambon, Maluku, Sabtu 1



Jusuf Kalla dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Perdamaian Dunia oleh World Assembly of Youth (WAY) dalam acara *The World Youth Forum on Peace and Harmony* di Kota Ambon, Maluku, Sabtu 1 Oktober 2011.



Oktober 2011.

Penghargaan itu disampaikan Wakil Presiden World Assembly of Youth (WAY), yang sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ahmad Doli Kurnia. Penghargaan ini diputuskan oleh 15 organisasi pemuda dari 15 negara yang mewakili lima benua.

Jusuf Kalla berterima kasih atas penghargaan tersebut. Penghargaan itu dianggap sebagai dukungan bagi bangsa Indonesia untuk terus menyelesaikan masalah dengan membuat perdamaian dan melestarikannya. "Membuat perdamaian itu bisa sebentar dan lebih mudah, tetapi melestarikan perdamaian lebih sulit dan butuh waktu bertahun-tahun," kata Jusuf Kalla. JK mengajak bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang muncul, termasuk



Wapres RI Jusuf Kalla disambut oleh Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang, MM dan FKPD Pemkab Poso dengan adat Pakasiwia di Di Bandara Kasiguncu Poso , Rabu 17 Juni 2016.



Pada acara Poso Harmoni ditampilkan berbagai atraksi kesenian dan teaterikal Deklarasi Malino yang telah menghadirkan kembali harmoni kedamaian di Poso.

konflik, dan tidak menghindarinya. Jika dihindari masalah itu justru bisa datang menyergap pada suatu waktu nanti.

Jusuf Kalla juga memperoleh gelar Doctor Honoris Causa di bidang perdamaian dari Soka University

Jepang, 2 Februari 2009. Gelar kehormatan yang diberikan karena ia dianggap berhasil mengupayakan penyelesaian konflik di beberapa daerah yang rawan konflik di Poso, Ambon dan Aceh.

Selain itu, Universitas Islam Malang

(Unisma) menganugerahkan Gelar Bapak Perdamaian Indonesia kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sabtu, 31 Oktober 2015. Rektor Universitas Islam Malang, Mas-kuri mengatakan Jusuf Kalla selama ini dianggap sebagai tokoh perda-



Universitas Islam Malang (Unisma) menganugerahkan Gelar Bapak Perdamaian Indonesia kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sabtu, 31 Oktober 2015.



Dalam acara Poso Harmoni dan Bersinar, Bupati Poso Plot Ingkiriwang mewakili masyarakat Poso menyerahkan piagam penghargaan kepada Wapres Jusuf Kalla atas jasa-jasanya sebagai inisiator dan pemrakarsa perdamaian serta harmoni dalam kehidupan warga Poso di Bumi Sintuwu Maroso.

maian yang dapat menjadi panutan masyarakat.

Pada acara 'Puncak Harmoni Poso' di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6/2015), Jusuf Kalla juga mendapatkan piagam penghargaan atas perannya mendamaikan konflik rasial di Poso. Saat tiba, JK disambut ribuan masyarakat Poso yang mengelu-elukan namanya. JK adalah tokoh yang sangat penting bagi masyarakat Poso. Keterpanggilannya turun tangan pada 2002 meleraikan konflik rasial di Poso dan menginisiasi perdamaian kelompok yang bertikai sangat bersejarah bagi masyarakat Poso.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla juga mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) bidang perdamaian dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Sabtu, 14 November 2015. Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir.

Samsul Rizal, M.Eng mengatakan pemberian gelar Honoris Causa kepada Jusuf Kalla karena peran aktifnya dalam proses perdamaian di Aceh. Tidak hanya proses damai di Aceh, menurut Samsul Rizal, JK juga aktif melakukan proses perdamaian di Mindanau, Thailand Selatan bahkan di Amerika Latin.

Pada Rabu, 27 Mei 2009, Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) menganugerahkan penghargaan Tokoh Perdamaian dan Persatuan Nusantara kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. IPNU menilai, Kalla merupakan tokoh yang sukses mendamaikan beberapa daerah konflik di Indonesia. Ketua Umum PP IPNU, Idy Muzayyad, mengatakan, penghargaan itu diberikan atas jasa-jasa mempersatukan dan mendamaikan konflik-konflik Indonesia.

Sembilan Gelar Doctor HC

Wakil Presiden Jusuf Kalla, tokoh Indonesia yang telah dianugerahi sembilan gelar Doctor Honoris Causa. Dua gelar dari universitas di luar negeri dan enam gelar dari universitas dalam negeri.

Gelar Doctor Honoris Causa Pertama diperoleh Jusuf Kalla dari Universiti Malaya diberikan pada 21 Juli 2007. Gelar itu dianugerahkan karena JK dianggap sosok yang mampu mengangkat ekonomi Indonesia. JK mencabut subsidi BBM. Keputusan tersebut membuat harga BBM di Indonesia melambung 105 persen sehingga menimbulkan protes luas.

Namun, menurut Naib Canselor Universiti Malaya Datuk Rafiah Salim, justru itulah yang membangkitkan ekonomi Indonesia karena beban subsidi anggaran berkurang.

Menurut Rafiah, Kalla sukses bermetamorfosis dari aktivis mahasiswa, pengusaha, politisi, menjadi negarawan. Kekuatan itulah yang membuat Kalla sukses menjadi arsitek ekonomi untuk membawa ekonomi Indonesia mendekati masa-masa sebelum krisis ekonomi 1997.

Gelar Doctor Honoris Causa Kedua, diperoleh dari Soka University Jepang, 2 Februari 2009. Gelar Doctor Honoris Causa di bidang perdamaian dari Soka University Jepang itu diberikan karena Jusuf Kalla dinilai berhasil mengupayakan



Jusuf Kalla menyampaikan orasi ilmiah saat menerima gelar Doctor Honoris Causa ketujuh dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).



Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prosesi memasuki Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan.

penyelesaian konflik di Poso, Ambon dan Aceh.

Dalam orasi ilmiahnya, Jusuf Kalla menekankan perlunya membangun perdamaian itu dengan memulihkan rasa percaya, membangun martabat pihak yang bertikai, menjalin persahabatan dengan pihak yang bertikai serta mencegah isu-isu yang dapat memicu konflik. “Dalam akar konflik di Maluku, dan Poso dikarenakan persoalan politik, sedangkan di Aceh karena ketidakadilan ekonomi,” katanya.

Gelar Doctor Honoris Causa Ketiga diperoleh Jusuf Kalla dalam bidang Pendidikan Kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Dalam upacara penganugerahan gelar kehormatan pada 17 Maret 2011, itu, Jusuf Kalla menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Kemajuan Bangsa, Pendidikan dan Kewirausahaan”.

Ketua Tim Promotor UPI, Prof Dr H Suryana, mengatakan pemberian gelar kepada JK, karena figurnya dianggap sangat mumpuni untuk dianugerahi gelar tersebut. “Dari aspek akademis maupun non-akademis, Jusuf Kalla tidak diragukan lagi, bahkan beliau adalah tokoh yang memiliki karakter disiplin, loyal, dan menunjukkan kepribadian yang selalu menghargai jati diri bangsa,” kata Sunaryo.

Gelar Doctor Honoris Causa Keempat, bidang ekonomi politik diterima dari almamaternya sendiri, Universitas Hasanuddin Makassar, pada 10 September 2011.

Profesor Basri Hasanuddin, mantan Rektor Universitas Hasanuddin yang juga Promotor penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Jusuf Kalla, menyatakan ada tiga alasan utama penganugerahan gelar Doktor Kehormatan tersebut. Per-



Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla bersama Rektor Unsyiah Prof Dr Samsul Rizal M.Eng dan Istri saat acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Jusuf Kalla.

tama, pandangan masyarakat tentang ketokohan JK selama ini. Kedua, pandangan JK tentang ekonomi cukup signifikan yang terungkap dalam berbagai komentar dan kebijakan yang ditempuhnya, khususnya selama menjabat Wakil Presiden RI. Terobosan tersebut kemudian melahirkan ikon “Kallanomic”.

Ketiga, apa yang dilakukan JK dengan pikiran-pikirannya dan menjaga hubungan antara pemerintah dengan DPR. Jalan yang ditempuh JK adalah dengan merebut kursi pimpinan Partai Golkar, sehingga hubungan antara pemerintah dengan DPR pada masa jabatannya tidak mengalami hambatan.

Gelar Doctor Honoris Causa Kelima, bidang perdamaian dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh pada 12 September 2011. Jusuf Kalla dinilai berhasil memelopori perdamaian di Aceh dengan melakukan pendekatan pendekatan sosio-kultural kepada pihak yang saling bertikai. Juga selama melakukan

tugas-tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Menkokesra), antara tahun 2001–2004, Jusuf Kalla telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku.

JK lewat pertemuan Malino I dan Malino II dan berhasil meredakan dan menyelesaikan konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim. Pun, kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD.

Demikian pula dalam upaya penyelesaian Aceh yang penanganannya dilakukan setelah JK dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Gelar Doctor Honoris Causa Kee-

nam dalam bidang pemikiran ekonomi dan bisnis dari Universitas Brawijaya Malang, 8 Oktober 2011. Dalam pengukuhan gelar Doctor Honoris Causa tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan pidato berjudul “Kemajuan Ekonomi, Kewirausahaan, dan Kemandirian Bangsa”.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya (UB), Dr Khusnul Ashar, mengatakan UB menilai Jusuf Kalla memiliki visi dan misi yang sama dengan fakultas ekonomi dalam pengembangan ekonomi di Tanah Air. Dia juga sebagai seorang pelaku bisnis yang sukses dan peduli terhadap masyarakat.

Gelar Doctor Honoris Causa Ketujuh bidang kepemimpinan, dari Universitas Indonesia (UI), Sabtu, 9 Februari 2013. Karena, menurut Rektor (Pjs) UI Djoko Santoso, Jusuf Kalla menampilkan diri sebagai seorang pemimpin transformasional yang mampu membawa organisasi pada sebuah tujuan baru yang lebih besar.

Jusuf Kalla dinilai layak memperoleh anugerah tersebut, karena kontribusinya di dunia kepemimpinan Indonesia. Selain itu, Jusuf Kalla telah mengungkap semangat entrepreneur atau kewirausahaan. "Semasa kepemimpinannya di pemerintahan, JK memiliki beberapa pemikiran yang menekankan, bahwa perdamaian tidak akan tercipta tanpa adanya dialog langsung antar pemangku kepentingan," kata Djoko Santoso.

Gelar Doctor Honoris Causa Kedelapan dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Sabtu 14 November 2015. Rektor Unsyiah Prof Dr

Samsul Rizal M.Eng menilai, Jusuf Kalla pantas menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Unsyiah karena telah berjasa bagi perdamaian di Aceh. “Sosok Bapak Jusuf Kalla merupakan sosok penting yang sangat pantas kita beri apresiasi sangat tinggi atas jasa-jasa Beliau terhadap terciptanya perdamaian di Tanah Iskandar Muda,” ujar Samsul Rizal dalam sambutannya.

Gelar Doctor Honoris Causa Kesembilan, bidang hukum dan pemerintahan daerah diperoleh Jusuf Kalla dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin, 5 September 2016. JK dinilai memiliki jasa luar biasa di berbagai bidang, sosial, budaya, kemanusiaan, dan kemasarakatan.

Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mengatakan, Kalla berjasa dalam pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI. Ketetapan itu berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

Kalla juga dinilai berjasa dalam memulai misi damai pemulihan pemerintah Aceh setelah gagalnya Cessation of Hostilities Framework Agreement (COHA) dan Joint Council Tokyo 2003. JK juga berjasa dalam Perundingan Helsinki dan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Jusuf Kalla dinilai berjasa juga dalam membumikan Desentralisasi Asimetris demi meneguhkan NKRI.

■ mti - TokohIndonesia.com

Duet Sais dan Joki

Indonesia 2004-2009



Arsitek Pemulihan Ekonomi 2004-2009

Pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wapres Jusuf Kalla (2004-2009) sungguh merupakan perpaduan yang unik. Laksana duet sais dan joki. Keduanya mengombinasikan kelebihan untuk menutupi kekurangannya.

SSBY yang berpikir cermat sebelum mengambil keputusan sehingga terkesan ragu (ang-gapan), disimbiosiskan secara mutual oleh tipikal pengusaha dari Jusuf Kalla yang cepat mengambil keputusan dan menghitung untung-rugi. Jusuf Kalla yang ingin agar bangsa ini bergerak cepat menuju kemajuan dengan lebih mengedepankan tujuan, diimbangi oleh posisi SBY yang harus menepuh segala prosedur sebab ia Presiden yang bertanggungjawab atas segala hal. Jusuf Kalla yang cerdas dan gesit begitu terlihat pragmatis dibalut dengan bahasa tubuh yang lugas, berbeda dengan SBY seorang jenderal berpikir yang bahasa tubuhnya dikesankan layaknya seorang akademisi (pemikir).

Di hadapan masyarakat, SBY piawai berpidato dan berwacana sehingga popularitas pemerintahan tetap terpelihara. Sementara di depan Jusuf Kalla bertindak cepat mewujudkan wacana kesejahteraan rakyat menjadi aksi nyata. Secara politik SBY yang berdarah Jawa dan merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia, ditopang oleh kehadiran Jusuf Kalla yang berdarah Bugis dan memperistri perempuan Minang dari Sumatera Barat.

Sangat tepat gambaran Berita Indonesia, yang pada edisi Novem-

ber 2005 mengapresiasi satu tahun usia Kabinet Indonesia Bersatu dengan menurunkan gambar sam-pul karikatur SBY-JK sebagai duet ideal sais dan joki yang sedang memimpin kereta kencana Indonesia bernama KIB.

Saat ditanya tentang pengalaman Jusuf Kalla bekerjasama dengan Presiden SBY, yang sering dikesankan cenderung peragu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan kesan demikian itu tidak sepenuhnya benar. "Sebenarnya beliau mengutamakan kebersamaan.

Tentu, dalam kebersamaan itu kan harus melaksanakan secara baik sosialisasi dan demokrasi yang baik walaupun termasuk yang terendah," kata Kalla.

Tidakkah Jusuf Kalla pernah merasa, Presiden SBY terlalu terlambat? "Ndak. Kan, karena hal-hal yang detil biasanya beliau minta saya laksanakan. Beliau seorang pemimpin yang baik mengetahui semua permasalahan," jelas Wapres Jusuf Kalla dalam percakapan eksklusif Tokoh Indonesia yang juga disertai wartawan Majalah Berita Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/10/2007).

Jusuf Kalla mengatakan gaya kepemimpinan bukan menjadi faktor yang menghambat



kerjasamanya dengan Presiden SBY. Buktinya memang dwitunggal ini bisa bertahan sampai 2009.

Selama lima tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, berbagai kemajuan sudah berhasil diraih. Misalnya, kondisi sosial politik stabil dan terkelola dengan baik. Keamanan dalam negeri juga jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kondisi ekonomi yang menyangkut masalah pokok berupa pengangguran, investasi, dan kemiskinan secara berangsur dapat diperbaiki.

Dalam hal pemulihan ekonomi

tersebut, Wapres mempunyai peran penting. Atas kesepakatan dengan Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla diberi tugas lebih utama menangani masalah ekonomi. Dia pun melakukannya dengan baik. Dia menjadi arsitek pemulihan ekonomi 2004-2009.

Pertumbuhan ekonomi lebih baik, secara umum kehidupan pun naik, income perkapita juga naik. “Ya, memang masih ada pasti masalah-masalah kemiskinan, pengangguran karena itu tidak bisa sekaligus selesai,” urai Kalla.

Salah satu keputusan paling berani kabinet SBY-JK adalah menaikkan

harga minyak rata-rata sebesar 100 persen per 1 Oktober 2005. Kebijakan ini ditempuh menyusul kenaikan minyak mentah di pasar dunia yang mencapai 65 dollar AS per barel. Dengan menyamakan harga minyak dalam negeri dengan luar negeri diharapkan subsidi BBM berkurang, penyelundupan minyak ke luar negeri karena disparitas harga yang tinggi juga dapat dikurangi.

Jusuf Kalla disebut-sebut berperan besar menaikkan harga minyak sebesar itu dan berlangsung sekaligus pula. Benarkah?

Jusuf Kalla menjawabnya dengan mengemukakan alasan kenapa menaikkan harga BBM sedemikian tinggi, sekaligus. “Ya, pertama, kalau kita tidak naikan harga, maka subsidiya tinggi sekali bisa mencapai Rp 250 triliun. Kalau subsidiya Rp 250 triliun maka negeri ini akan kolaps, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu harus dinaikkan, tapi menaikkannya juga sekali saja, biar tinggi. Karena, biar demonya sekali saja. Tapi secara bersamaan kita kasih bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin. Jadi aman,” jelas Kalla.

Kebijakan menaikkan BBM itu kata Kalla tentu sudah mempertimbangkan opini publik, dan ia sudah siap mengambil risiko penurunan popularitas. “Oh, kita ambil risiko. Jadi pemimpin harus punya risiko,” kata Kalla.

Inisiatif itu konon dari Pak JK juga? “Ah... ha... ha...ha. Sama-samalah semuanya.”

Menaikkan harga minyak sekaligus menggambarkan pula karakter khas Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang berani ambil risiko, tapi secara pragmatis mempunyai tujuan mem-

berikan rasa aman. Demo dan perlawanan rakyat dia hadapi. Banyaknya rakyat yang jatuh miskin disangga dengan menebar bantuan tunai langsung ke rakyat-rakyat miskin, sebesar Rp 100 ribu perbulan dibagikan sekali per tiga bulanan.

Dalam sudut pandang yang berbeda, sesungguhnya tidak sedikit kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah ketika itu. Misalkan, andai saja dana bantuan tunai yang triliunan rupiah digunakan untuk membangun proyek-proyek padat karya di bidang infrastruktur, akan ada beberapa sasaran yang tercapai. Yaitu, banyak rakyat yang memperoleh lapangan kerja, infrastruktur baru yang terbangun akan mempercepat laju pemulihan ekonomi, dan muaranya perbaikan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Para analis menilai kinerja KIB khususnya kepemimpinan SBY-JK menganggap, pilihan memberikan bantuan langsung tunai merupakan salah satu nila yang merusak keberanian pemerintah menaikkan harga BBM. Nila lain berasal dari Menkominfo ketika itu, Sofyan A. Djalil yang mengampanyekan hemat energi dengan kebijakan mematikan lampu-lampu penerangan di malam hari serta membatasi siaran televisi di malam hari.

Selain tidak demokratis dan menghambat kreativitas masyarakat, mematikan lampu dan membatasi siaran televisi hingga tengah malam justru memancing timbulnya berbagai aksi kriminalitas, yang membuat masyarakat hidup kurang nyaman.

Kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK memang banyak kesandung persoalan energi, (Selain persoalan bencana alam yang bertubi-tubi



menghadang dan menguras banyak tenaga, waktu, pikiran dan dana). Pasca kenaikan harga minyak Oktober 2005 pemerintah mengampunayakan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) untuk kendaraan, dan briket batubara pengganti minyak tanah di rumah tangga. Hasilnya? Biofuel sebelum mencapai tujuan maksimalnya menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar dan premium, kehadirannya secara global justru mengancam ketahanan pangan.

Produksi bahan pangan banyak diarahkan untuk memenuhi bahan baku biofuel dunia. Padahal akibat perubahan iklim global banyak negara terancam gagal panen. Demikian pula penggunaan briket batubara, sebelum berhasil mencapai sasaran sudah diganti kebijakan baru konversi minyak tanah ke LPG. Briket batubara ditinggalkan.

Tetapi kebijakan dadakan ini tak disertai persiapan dan sosialisasi yang matang. Ketika pasokan minyak tanah dikurangi banyak rumah tangga menjerit hingga terpaksa mengantri minyak di pangkalan. Mencari kompor gas dan tabung LPG susahnyanya bukan main. “Itulah dalam rangka mengurangi subsidi.

Kalau tidak, subsidi kita terlau tinggi. Dan itu menguntungkan semua pihak sebenarnya. Menguntungkan masyarakat karena LPG jadi murah dibanding itu. Dan juga menguntungkan pemerintah kita bisa menghemat sibsidi besar sekali,” kata Kalla.

BUMN Terlalu Banyak

Wapres mengakui badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Tetapi jumlah yang terlalu banyak membuat sistem pengelolaan tidak bisa menjadikan BUMN menjadi motor penggerak ekonomi.

“Terlalu banyak jadi kita harus kurangi terutama BUMN yang kecil-kecil,” kata Kalla. Rencananya, pemerintah akan mengurangi jumlah BUMN hingga setengahnya dengan cara merger atau cara lain. “Kalau terlalu banyak begini susah sekali. Dan juga harus banyak mencari orang-orang yang memimpin dengan peduli menggerakkan perekonomian rakyat merupakan pengalaman terbaik Kalla sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Kepala Bulog pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dilanjutkan saat Menko Kesra pada era

Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ketika menjabat Menko Kesra Kalla pernah mengumpulkan semua direksi bank-bank

BUMN, supaya mengucurkan kredit untuk mendukung kegiatan sektor riil dan UKM. Setelah menjadi Wapres lebih-lebih lagi, Kalla semakin keras mendorong perbankan agar menggerakkan sektor riil.

Tujuannya tentu supaya bank-bank menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, termasuk membiayai berbagai program berskala raksasa seperti gula, infrastruktur, jalan tol, jalan, UKM dan sebagainya supaya semua jalan.

JK mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi makro yang baik pasti diikuti dengan pergerakan mikro yang baik. Contohnya, listrik yang sesekali mengalami pemadaman disebabkan oleh kebutuhan listrik yang banyak sekali karena semua industri jalan.

Jalanan yang macet juga disebabkan banyaknya penjualan mobil dan sepeda motor. Fakta lain kontainer-kontainer yang memenuhi jalan-jalan adalah bukti ekonomi berjalan.

“Jadi, sering orang otomatis saja mengatakan sektor mikro tidak jalan. Tidak mungkin makro jalan tanpa mikro. Mesti selalu berbarengan,” kata Kalla.

Pertumbuhan ekonomi yang 6,2 persen diakui Kalla turut dipacu oleh pembangunan infrastruktur, salah satunya prasarana transportasi darat, kereta api, laut dan udara. Ke depan proses pembangunan infrastruktur akan semakin diarahkan untuk memacu ekonomi nasional. Buktinya, untuk tahun ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian saja mencapai Rp 4,3 triliun.

“Ini sebenarnya kita mau pacu tapi ada saja halangan-halangnya. Dulu masalah dana, kita selesaikan dana. Kedua, sekarang setelah kita selesaikan dana masalah lahanlah yang harus berubah fungsi. Kendala pembebasan lahan ini kita selesaikan,” terang Kalla, menjelaskan prioritas pembangunan transportasi perkeretaapian nasional yang sudah merupakan kebijakan politik KIB kala itu.

Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla sangat peduli membangun sarana dan prasarana perkeretaapian. Pada bulan Februari 2007, misalnya, Wapres dan sejumlah menteri terkait secara sengaja mengadakan rapat kerja teknis perhubungan di atas kereta api dalam sebuah perjalanan dari Jakarta menuju Madiun. Di atas gerbong kereta itu, “Saya minta mereka bikin perencanaan yang baik. Sebenarnya rapat kemarin untuk memeriksa perencanaan itu, dan kita akan bangun perkeretaapian kita dengan kemampuan sendiri.

Kemudian, dalam Pilpres 2009, duet pasangan ini berpisah jalan. SBY memilih Boediono sebagai pasangannya menggantikan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla sendiri maju sebagai Capres berpasangan dengan Wiranto. SBY-Boediono memenangkan Pilpres, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Kemajuan ekonomi yang relatif baik dalam lima tahun KIB Jilid I, cenderung melambat pada KIB Jilid II. KIB Jilid II tampak lebih gemar memelihara angka-angka statistik untuk menjaga stabilitas daripada melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

■ mti - TokohIndonesia.com

Wakil Presiden 2014-2019

Setelah hampir lima tahun pensiun dari dunia politik dan memusatkan kegiatan dalam ladang pengabdian kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla kembali ke kancah politik. Tak tanggung-tanggung karier politiknya kembali ke puncak. Dia kembali terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

Menjelang Pilpres 2014, Jusuf Kalla dengan amat jeli kembali melirik politik. Hebatnya, dia tampil atas kekuatan politik dirinya sendiri. Dia tidak menggantungkan kekuatan politiknya kepada Partai Golkar, partainya sendiri sejak empatpuluhan tahun lalu dan pernah dipimpinnya sebagai Ketua Umum.

Tapi dengan jeli, dia mendekati Jokowi, seorang kader PDI Perjuangan yang tengah melejit dari Walikota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Capres unggulan. Beberapa pimpinan partai, termasuk Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) berusaha untuk berpasangan dengan Jokowi. Tapi, akhirnya Jokowi memilih Jusuf Kalla menjadi pasangannya tanpa dukungan formal partai politik (Golkar).

Jusuf Kalla yang jenjang politiknya sudah mentok (mati) di Golkar, seperti tidak ada matinya. Justru teman-temannya yang tengah berkuasa di Partai Golkar terjerembab dalam langkah mati. Bahkan ARB untuk sekadar jadi Capres

atau Cawapres pun tak bisa.

Justru JK yang sudah tereliminasi dari Golkar berjaya mendapat tiket Cawapres dan terpilih menjadi Wapres 2014-2019.

Setelah dilantik menjadi Wapres untuk kedua kalinya, publik me-



Wapres Jusuf Kalla

nunggu kiprahnya ketika berpasangan dengan Presiden Jokowi, seorang pemimpin muda yang amat lincah. Ternyata, Jusuf Kalla yang sudah berusia di atas tujuh puluh tahun bisa menyesuaikan diri. Berbeda saat ketika dia mendampingi Presiden SBY, saat mendampingi Presiden Jokowi, Jusuf Kalla tampaknya merasa tak harus lagi bergerak cepat menjadi eksekutor. Dia cukup merasa nyaman memberi masukan dan dorongan sebagai pendamping Presiden.

Jusuf Kalla tampak lebih banyak melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan tugas di jajaran Kabinet Kerja dengan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut Nawacita, yakni:

Pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Kedua: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keempat: Menolak negara lemah

dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kelima: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kedelapan: Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kesembilan: Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

■ mti - TokohIndonesia.com

Biodata Jusuf Kalla

Nama:

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Nama Populer:

Jusuf Kalla | JK

Nama Panggilan:

Ucu

Lahir:

Watampone, Sulawesi Selatan, Jumat, 15 Mei
1942

Agama:

Islam

Jabatan Utama:

Wakil Presiden RI (2004-2009 dan 2014-2019)

Isteri:

Hj. Mufidah Miad Saad Jusuf

Anak:

· Muchlisa Jusuf · Muswirah Jusuf · Imelda Jusuf ·
Solichin Jusuf · Chaerani Jusuf

Ayah:

Hadji.Kalla

Ibu:

Athirah Kalla

Saudara:

· Fatimah Kalla · Achmad Kalla · Halim Kalla ·
Suhaeli Kalla · Zohra Kalla

Pendidikan:

· Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin
Makasar, 1967.
· The European Institute of Business Administration
Fountainebleu, Prancis (1977)

Karier:

· Wakil Presiden Republik Indonesia, 2014-2019
· Ketua Umum Palang Merah Indonesia, 2009-2014
· Wakil Presiden Republik Indonesia, 2004-2009
· Ketua Umum DPP Partai Golkar, 2004-2009
· Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat, 2000—
2014
· Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, 2001-2004
· Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia, 1999-2000
· Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia,
1997-2002
· Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel Interna-
tional Organisasi, 1995 — 2001
· Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa, 1993-2001
· Ketua IKA-UNHAS, 1992—sekarang
· Komut PT. Bukaka Teknik Utama, 1988-2001

· Dirut PT. Bumi Sarana Utama, 1988-2001

· Wakil Ketua ISEI Pusat, 1987-2000

· Ketua Umum KADIN Susel, 1985—1997

· Ketua Umum ISEI Sulawesi Selatan, 1985-1995

· Anggota MPR-RI, 1982—1999

· Direktur Utama PT. Bumi Karsa, 1969-2001

· CEO NV Hadji Kalla, 1968-2001

· Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Sekber
Golkar, 1965-1968

Penghargaan:

· Doctor Honoris Causa bidang ekonomi dari
Universiti Malaya, Malaysia, 21 Juli 2007.
· Doctor Honoris Causa bidang perdamaian dari
Soka University Jepang, 2 Februari 2009.
· Doctor Honoris Causa bidang Pendidikan
Kewirausahaan dari Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) Bandung, 17 Maret 2011.
· Doctor Honoris Causa bidang ekonomi politik dari
Universitas Hasanuddin, Makassar, 10-9-2011.
· Doctor Honoris Causa bidang perdamaian dari
Universitas Syiah Kuala, Aceh, 12 September 2011.
· Doktor HC bidang pemikiran ekonomi dan bisnis
dari Universitas Brawijaya Malang, 8 Oktober 2011.
· Doctor HC bidang kepemimpinan dari Universitas
Indonesia, Sabtu 9 Februari 2013
· Doctor Honoris Causa bidang perdamaian dan
kemanusiaan dari Universitas Syiah Kuala
(Unsyiah), Darussa-lam, Banda Aceh, Aceh, 14
November 2015.
· Doctor Honoris Causa bidang hukum dan
pemerintah daerah dari Universitas Andalas,
Padang, Sumatera Barat, 5 September 2016.
· Penghargaan sebagai tokoh perdamaian dunia
Royal Order Sahametrei Officer (Bintang Maha-
putra Utama) dari Raja Kamboja, Norodom
Sihamoni di Phnom Penh, 19 September 2011.
· Penghargaan sebagai Tokoh Per-damaian Dunia
oleh World Assembly of Youth (WAY) dalam acara
The World Youth Forum on Peace and Harmony
(Pertemuan Pemuda Dunia untuk Perdamaian) di
Kota Ambon, Maluku, Sabtu 1 Oktober 2011.
· Penghargaan Budai (Budaya Akademik Islami)
dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang
· Penghargaan Dwidjosowojo Award dari Asuransi
Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera
· The Most Inspiring Person
Pusat Data Tokoh Indonesia

THE FIELD GENERAL DAN SANG PEMIMPIN



 TUHOR.COM

Personally Selected Books

BUKU PILIHAN

personally selected books

ASISTEN ANDA

Dipilih oleh
para pencinta
buku



Toko online buku-buku pilihan,
buku klasik, dan buku langka.

TUHOR.COM

id.tuhor.id

[f tuhorcom](https://www.facebook.com/tuhorcom)

[t tuhorcom](https://www.tuhor.com)

[p tuhorcom](https://www.pinterest.com/tuhorcom)